

Hak Oktroi VOC di Nusantara (Indonesia)

Rosmaida Sinaga¹ Pretty Pakpahan² Kinanti Naya Natasha³ Tesa Romanti Sibarani⁴

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

rosmaidasinaga@unimed.ac.id¹ prettypakpahan7@gmail.com²

kinantinayanatasha@gmail.com³ tesaromantisibarani10@gmail.com⁴

Abstrak

Kajian ini membahas tentang latar belakang pemberian hak oktroi kepada Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) dan hak hak oktroi VOC serta dampak pelaksanaan hak oktroi VOC. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Berdasarkan hasil penelusuran dari buku dan artikel diketahui bahwa latar belakang pemberian hak okroi kepada VOC adalah karena Kerajaan Belanda ingin mengamankan jalur perdagangan di Hindia Timur (Nusantara) dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Adapun hak oktroi VOC adalah memiliki wewenang untuk berdagang, mengambil tindakan politik, melancarkan perang, mendirikan benteng, memiliki tentara, mengangkat penguasa di wilayah Nusantara (Indonesia) atas nama Staten Generaal. Dampak pelaksanaan hak-hak octroi bagi VOC adalah VOC mampu membangun sistem aliansi politik (persekutuan) dengan penguasa pribumi (raja atau sultan) dan memperoleh penyerahan hak monopoli penguasa pribumi atau wilayah tertentu di Nusantara.

Kata Kunci: Hak Oktroi, VOC, Nusantara

Abstract

This study discusses the background to the granting of octroi rights to the Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) and the VOC's octroi rights as well as the impact of the implementation of VOC octroi rights. The method used in this research is a historical research method with four stages, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography. Based on the results of searches from books and articles, it is known that the background to granting okroi rights to the VOC was because the Dutch Kingdom wanted to secure trade routes in the East Indies (Nusantara) and monopolize the spice trade. The VOC's octroi rights were to have the authority to trade, take political action, wage war, build forts, have an army, appoint rulers in the archipelago (Indonesia) in the name of Staten Generaal. The impact of implementing octroi rights for the VOC was that the VOC was able to build a system of political alliances (alliance) with native rulers (kings or sultans) and obtain the transfer of monopoly rights to native rulers or certain regions in the archipelago.

Keywords: Octroi, VOC, Archipelago



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Vereenigde Oostindische Campagnie (VOC) merupakan suatu perusahaan dagang antarbenua yang dibentuk di Negeri Belanda pada tahun 1602. VOC sebagai kongsi dagang dibentuk untuk menghindari persaingan antarpedagang Belanda. Setelah VOC berdiri, lebih banyak kapal dikirim ke Asia dan perolehan monopoli pada region itu diakibatkan oleh hak octrooi (piagam) yang dimilikinya. Hak-hak ini memberi kesempatan pada VOC untuk melakukan perang atas nama pemerintah Belanda, membuat perjanjian-perjanjian dewasa ini dengan pemerintah setempat, mendirikan pos perdagangan, membangun benteng-benteng, membentuk tentara, dan mengangkat para administrator di Asia. Salah satu hak dasar VOC ialah kemampuannya dalam melakukan perundingan dengan penguasa-penguasa setempat. Beberapa perundingan dagang antara VOC dan para penguasa setempat berhasil serta

memberikan keuntungan kepada VOC, namun kadang-kadang pula perundingan ini berujung pada perang. Pada mulanya serangan militer VOC tidak ditujukan kepada masyarakat lokal tetapi merupakan bagian dari peperangan terhadap orang-orang Portugis yang merupakan pesaing bisnis mereka di Asia. Namun dalam perkembangan selanjutnya VOC juga melekatkan diri pada masyarakat secara lokal sehingga dianggap sebagai penjajah baru yang menggantikan orang-orang Portugis. Sekitar tahun 1608-1609 Cornelis Matelieff de Jonge mantan direktur VOC yang berasal dari Rotterdam mengusulkan pembentukan sebuah kerajaan dengan pusat administrasi permanen di Asia—mirip model Portugis di Goa. Ide ini menjadi kenyataan ketika Jan Pieterszoon Coen menaklukan Jacatra lalu mengganti namanya menjadi Batavia oleh Raja Belanda. Perluasan VOC di Asia mengakibatkan didirikannya kantor-kantor VOC lainnya di Asia yang semuanya berada di bawah kekuasaan Batavia. Kantor ini melapor kepada pejabat-pejabat VOC di Batavia sehingga timbullah network network yang saling berkorespondensi dalam kaitan dengan masalah ekonomi, politik, dan sosial. Akan tetapi, melalui komunikasi ini, fakta fakta social dijadikan objek pertukaran antara Batavia dengan kantor-kantor lainnya dimana terdiri atas redius Belanda.

Setelah pembentukan VOC, semakin banyak kapal yang dikirim ke Asia. Hak octrooi memberikan secara eksklusif kedudukan yang mulia kepada VOC sebagai satu-satunya premis di Asia. Juga ia berhak untuk mengumumkan perang atas nama pemerintah tertinggi Belanda. VOC mempunyai hak membuat perjanjian dengan raja-raja tempatan di Asia. Kuasa tersebut telah memberikan kesempatan bagi VOC untuk mendirikan pos-perdagangan, membangun benteng-benteng, membentuk angkatan bersenjata dan mengangkat pegawai-pegawai dikegiatan administrasi sebagai perwakilan di Asia. Sebagai perusahaan dagang terkemuka di tanah Melayu, VOC telah menyebabkan kerugian ekonomi di wilayah ini, karena VOC telah memonopoli perdagangan dengan menggunakan hak-hak istimewa yang tidak adil. Dalam hal ini, hak istimewa tersebut dikenal dengan sebutan oktrooi, yang dengan hak oktrooi ini, memungkinkan VOC untuk menggunakan mata uangnya sendiri dalam transaksi perdagangannya, membangun angkatan bersenjatanya dan juga menentukan kebijaksanaan perdagangannya. Hal ini pula yang memungkinkan terjadinya eksploitasi rempah-rempah dengan kekerasan serta pembentukan polarisasi perdagangan yang sering kali merugikan masyarakat pribumi, dengan harga jual rempah-rempah yang rendah terhadap petani.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian sejarah dengan empat tahapan *heuristic*, kritik atau *verifikasi*, interpretasi, dan historiografi (Abdurahman, 2011). Studi *literature review* menjadi bagian yang penting dalam mengupas permasalahan. *Pertama*, *heuristic* (mengumpulkan sumber), sumber tertulis menjadi fokus pada kajian ini. Terutama kajian terdahulu seperti; R.Z. Leirissa (1999), Rosmaida Sinaga (2020). menjadi rujukan utama dalam kajian ini. *Kedua*, *Kritik*. Sumber sejarah yang telah diperoleh seyogyanya dicroscek kebenarannya, dengan mempertimbangan fakta yang diutarakan. *Ketiga*, *interpretasi*, pada bagian ini fakta sejarah dideskripsikan, dinarasikan, dan dianalisis. Peneliti menjelaskan (eksplanasi) dengan dua cara yaitu mencipta ulang (*re-create*) dan menafsirkan (*interpret*). Data yang telah didapatkan direkonstruksi ulang hingga ditemukan kebaharuan dan narasi sejarah sesuai dengan faktanya. *Keempat*. Historiografi, pada bagian ini, dikumpulkan semua interpretasi lalu disajikan dalam bentuk narasi analisis.

Latar Belakang Pemberian Hak Oktroi Kepada VOC

Sebelum pembentukan VOC, para pedagang Belanda telah melakukan perdagangan di Nusantara. Dalam melakukan perdagangan tersebut, acapkali tidak terhindar dari persaingan yang tidak sehat di antara mereka. Persaingan antarpedagang Belanda yang melakukan

pelayaran niaga ke Nusantara menyebabkan jatuhnya harga rempah-rempah di Eropa. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat di antara para pedagang, maka pada 20 Maret 1602 beberapa badan-badan dagang Belanda bersepakat untuk menyatukan semua dana dan tenaga dalam satu organisasi dagang yang diberi nama Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau Gabungan Perusahaan-Perusahaan Dagang Hindia Timur. Kesepakatan Badan-Badan Dagang Belanda tersebut dikuatkan oleh Staten Generaal atau Dewan Negara melalui suatu oktroi (hak-hak istimewa) yang berlaku selama 21 tahun. Pemberian hak-hak oktroi kepada VOC membuktikan bahwa pemerintah Belanda memberi dukungan dan perlindungan sepenuhnya kepada VOC. Hak-hak oktroi VOC yang diberikan pada tahun 1602 itu diperpanjang terus setiap 21 tahun hingga tahun 1795 (Rosmaida Sinaga, 2020). Pemberian hak-hak oktroi kepada VOC menyebabkan VOC menjadi perusahaan dagang antarbenua dan menjadi tulang punggung dari pertumbuhan kapitalisme di negeri Belanda dalam abad ke-17 dan ke-18.

Hak-Hak Oktroi VOC

Parlemen Belanda (Staten Generaal) memberikan hak oktroi kepada VOC agar VOC dapat mengurus masalah perdagangan Belanda di Nusantara dengan leluasa. Berdasarkan hak-hak oktroi VOC memegang perdagangan antara Tanjung Harapan (terletak di Afrika Selatan) dan Selat Magelhaens (sebuah selat di ujung selatan Benua Amerika). Dengan pemberian hak monopoli perdagangan tersebut berarti setiap pedagang atau organisasi dagang di Belanda yang ingin bergabung di wilayah antara Tanjung Pengharapan dan Selat Magelhaens hanya dapat melakukannya dengan cara berpartisipasi dalam VOC melalui pembelian sahamnya. VOC memusatkan perdagangannya pada rempah-rempah (cengkeh, pala, fuli dan lada), tekstil dari India, sutra dan porselin dari Cina (Rosmaida Sinaga, 2020). Hak oktroi VOC bukan hanya berwenang dalam bidang perdagangan, melainkan juga berwenang melakukan tindakan-tindakan politik. VOC memiliki wewenang untuk melakukan hubungan dengan para penguasa di wilayah antara Tanjung Pengharapan dan Selat Magelhaens, melancarkan perang, mendirikan benteng-benteng, memelihara tentaranya sendiri, dan mengangkat para penguasa di wilayah antara Tanjung Pengharapan dan Selat Magelhaens semuanya atas nama "Staten Generaal". Hak-hak oktroi VOC di bidang monopoli perdagangan dan kekuasaan politik menyebabkan praktek-praktek dagang VOC dapat dikategorikan sebagai "armed trade". Hal ini berarti VOC merupakan organisasi dagang yang bersenjata.

Dampak Hak Oktroi VOC

Membangun sistem aliansi politik (persekutuan) dengan penguasa pribumi (raja atau sultan). Dengan adanya hak oktroi, VOC berhasil menciptakan militer yang tangguh. Angkatan bersenjata ini dipergunakan untuk menekan kerajaan-kerajaan di wilayah Indonesia agar tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh VOC. Hal ini terbukti dalam campur tangan VOC dalam urusan beberapa kerajaan di Nusantara, contohnya seperti Kesultanan Banjar dan Kesultanan Mataram. Mereka melakukan intimidasi bahkan penaklukan dengan memanfaatkan hak oktroi untuk membangun pasukan dan menempatkan Raja Boneka selaku penguasa, demikianlah cara kerja Belanda lewat VOC untuk menguasai sepenuhnya pulau-pulau di Nusantara. Selain itu, dengan mempunyai angkatan laut yang kuat dan pasukan bersenjata modern, VOC dapat menyekat armada-araada negara Eropa lainnya yang ingin mempengaruhi Nusantara. Buktinya dalam tahun 1663 pasukan VOC berhasil mengusir orang Spanyol dari Tidore. Tetapi, hak oktroi VOC tidak mempunyai batasan. VOC harus selalu melaporkan keuntungan dagang kepada Staten General atau parlemen Belanda dan

membayar pajak. Begitu pula, pada masa terjadinya peperangan, VOC diperhadapkan kepada kewajiban untuk memberikan bantuan kepada negeri Belanda. (Fandy, 2021) Memperoleh penyerahan hak monopoli penguasa pribumi atau wilayah tertentu di Nusantara. Pada tahun 1609, VOC telah berhasil mengembangkan pengaruhnya di Maluku dan Bandaneira. Di tahun yang sama juga, Heren XVII mengangkat Pieter Both sebagai Gubernur jenderal VOC yang pertama yang ditempatkan di Ambon, Misinya adalah untuk memimpin VOC dalam menjalankan persaingan dengan pedagang-pedagang Eropa lainnya. VOC mulai melakukan perjanjian dengan raja-raja setempat, antara lain Maluku, Hitu, Banda dan Haruku. Akan tetapi, setiap perjanjian selalu mengandung unsur hak monopoli. Ketika Jan Pieterszoon Coen menjadi gubernur jenderal, ia memindahkan pusat kekuasaan dari Ambon ke Jayakarta. Selama kurun waktu yang lama, perusahaan tersebut meminta izin untuk kegiatan impornya.

Awalnya barang utama perdagangan voc adalah rempah-rempah. Rempah-rempah berkuasa hingga abad ke-18. Kemudian, rempah-rempah tidak lagi dianggap menguntungkan di Eropa. Masuknya komoditas perdagangan lain dianggap sebagai faktor yang menyebabkan penurunan nilai perdagangan rempah-rempah. Komoditas perdagangan baru ini meliputi kopi, teh, tembakau, dan nila. Beberapa peraturan bahkan dicoba diberlakukan oleh VOC ketika menjalankan monopoli perdagangannya. Faktanya, pelaksanaan monopoli perdagangan VOC lebih lambat daripada monopoli perdagangan Portugis. Ini termasuk larangan menjual hasil pertanian kepada perusahaan-perusahaan VOC dan perpajakan atas produk-produk pertanian. Lebih jauh, VOC juga menetapkan standar-standar khusus seperti ukuran wilayah dan oleh VOC. Kemudian prosesi ini dijadikan raja yakni pejabat pemerintahan yang ada di bawah residen beserta para pembantunya. Akibatnya seorang raja memperoleh gaji dari pemerintah sebagai pengganti rugi. Di bawah pemerintahan raja terdapat seorang bupati yang ditunjuk untuk memimpin salah satu daerah tertentu. Di bawah bupatinya terdapat kepala-kepala rakyat dan yang selanjutnya menempatkan rakyat-rakyat itu ke tingkat paling rendah dari suatu hierarki. Doktrin pemerintahan tersebut telah ada sejak zaman kolonial Hindia Belanda. (Hanindita Basmatulhana, 2022) Penyebaran hegemoni VOC ikut campur dalam dinamika politik bangsawan dan monopoli perdagangan. Pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan prinsip adu domba, yang terkadang dikenal sebagai politik belah. Filosofi politik ini menjadi salah satu alasan utama mengapa VOC dapat meningkatkan potensi ekonomi yang ada di Jawa. Meskipun demikian, pencemaran VOC tidak berbahaya. Pada tanggal 1 Januari 1800, pemerintah Belgia memperkenalkan VOC. Skandal internal dan kebobrokan manajerial VOC di berbagai bidang mengatur pembubaran VOC. Akibatnya, ancaman senyawa organik yang mudah menguap di wilayah pesisir dilaporkan kepada pemerintah Belgia. Meskipun demikian, pada saat itu, Belgia juga dalam keadaan tidak konstruktif. Di satu sisi mereka mengalami krisis seperti kendala bahasa Inggris dalam konteks perlunya memperhatikan masalah lingkungan yang muncul akhir-akhir ini.

Sebelum ada VOC, Belanda belum menjadikan Hindia Timur sebagai wilayah kekuasaan mereka yang tahan lama. Namun tetap saja VOC memiliki manajemen di negara Belanda. Ada 6 orang anggota dewan yang bernama Bewindhebbers der VOC, serta ada 17 orang direktur eksekutif yang terkenal dengan sebutan Heeren XVII. Untuk dapat mewujudkannya secara efisien, Parlemen Belanda memberikan hak-hak istimewa tertentu kepada VOC. Hak-hak istimewa ini sering disebut juga dengan hak eksklusif atau privilege, yang memberikan wewenang kepada perusahaan dagang ini untuk;

1. Mengadakan persetujuan dengan raja-raja lokal;
2. S. Lewis pernah berkata, "Keberanian bukan satu dari kebajikan, tetapi semua kebijaksanaan dicobakan dalam keberanian".
3. Menggunakan mesin-mesin produksi senjata-senjata dan benteng yang perlu dibangun

4. Mencetak uang sebagai bagian dari kebijakan keuangan
5. Mempersuntikkan tenaga kerja yang rumit dan
6. Mengadili perkara-perkara tertentu Artinya, karena alasan itu, VOC sangat bergantung pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan politik dan militer Belanda; Selain itu negara dagang yang lain pun karena juga merupakan lembaga pucuk atau otoritas pemerintah selain menjalankan rutinitas merek tersebut.

Octroi, berasal dari kata Prancis *octroyer*. Ini menandakan izin khusus dan unik. Izin ini diberikan oleh pemerintah kepada individu atau badan usaha, dan biasanya melibatkan monopoli. Piagam VOC memberi mereka wewenang untuk terlibat dalam perdagangan. Namun, wilayah perdagangannya terbatas, yaitu di sebelah timur Tanjung Harapan dan di sebelah barat Selat Magellan. Dalam hal ini, Indonesia juga termasuk. Sementara itu, di beberapa negara Eropa, hak octroi digunakan untuk pemungutan pajak. Misalnya, pajak atas hasil pertanian yang diangkut ke kota dipungut oleh para bangsawan pemegang hak octroi. VOC dengan cepat memperluas pengaruhnya. Ukuran modal yang tertanam tumbuh dan wilayah di bawah pengaruhnya meluas. Dalam memperluas pengaruhnya, VOC awalnya berfokus pada daerah-daerah. Hak Oktroi bersifat eksklusif, yang berarti para pemegang hak khusus ini memiliki hak untuk memasarkan atau mengambil keuntungan dari suatu daerah. Dalam hal ini, hak ini memberikan VOC kekuasaan monopoli atas teknologi atau komoditas tertentu. Pihak yang memegang hak oktroi boleh saja melarang pihak lain menggunakan penemuan tersebut untuk kepentingan komersial seperti produksi, pengimporan, penyimpanan dan lain-lain. Dengan diberikan hak oktroi ini, VOC diizinkan untuk menjalankan bisnis seolah-olah mereka adalah negara pada koloni Belanda di Hindia Timur (Mesakh Ananta Dachi, 2023). Perkembangan yang dicapai VOC tidak bertahan lama. Dalam waktu kurang dari dua ratus tahun kelompok dagang mulai menurun dan bahkan bubar. Beberapa sebab-sebab mengapa VOC mengalami degradasi adalah:

1. Pegawai VOC banyak yang melakukan tindakan korupsi meski tidak terlalu besar. Dalam hal ini VO tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan dagang Eropa seperti EIC Inggris atau FIC. Meski mengalami kerugian, deviden tetap dijanjikan kepada pemegang saham sehingga mengakibatkan penurunan modal.
2. Perang antara Belanda dan Inggris (1780-1784) meimbulkan biaya yang tidak sedikit.

VOC diberikan oleh pemerintah Belanda hak monopoli perdagangan di Hindia Timur (sekarang Indonesia). Salah satu hak ini adalah hak untuk mengatur perdagangan, memungut pajak, dan mencetak uang. Monopoli perdagangan, pemungutan pajak, pencetakan mata uang, pengaturan pelayaran, penyelenggaraan peradilan, pembentukan tentara, dan penandatanganan perjanjian adalah semua contoh hak oktroi VOC yang sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan politik Indonesia. VOC dapat menguasai perdagangan rempah-rempah Asia dan menjadi salah satu perusahaan paling kuat di dunia berkat hak ini. Namun, korupsi dan pemerasan adalah beberapa masalah yang ditimbulkan oleh hak oktroi ini. Hak oktroi VOC pada akhirnya dicabut oleh pemerintah Belanda pada tahun 1799. Hak oktroi VOC memberi mereka monopoli perdagangan. VOC memiliki hak monopoli perdagangan untuk berdagang di Hindia Timur (sekarang Indonesia). Ini menunjukkan bahwa hanya VOC yang diizinkan untuk membeli dan menjual barang-barang di daerah tersebut. VOC menggunakan monopoli perdagangan untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah di Asia. Pada saat itu, rempah-rempah adalah komoditas yang sangat berharga, dan VOC dapat memperoleh keuntungan besar dari perdagangannya. Monopoli perdagangan VOC juga memiliki efek yang signifikan. Pemegang hak oktroi dapat melarang pihak lain untuk mengeksploitasi sendiri

penemuan tersebut secara komersial, termasuk produksi, impor, penggunaan, penyimpanan, dan sebagainya. Pemberian hak oktroi ini memberikan kewenangan kepada VOC untuk menjalankan bisnis seolah-olah mereka adalah negara jajahan Belanda di Hindia Timur. Selain itu, hak oktroi juga mengharuskan perusahaan dagang lain untuk mendapatkan izin atau membayar kepada VOC sebagai prasyarat untuk melakukan kegiatan perdagangan di Hindia Timur. Tujuan pemberian hak paten ini kepada VOC adalah untuk mengamankan jalur perdagangan di Hindia Timur terutama dengan memanfaatkan kekayaan rempah-rempah dan sumber daya alam lainnya yang ditemukan di sana. Kepulauan yang dikenal sebagai Nusantara telah menjadi sasaran oleh negara-negara Eropa lainnya seperti Portugis dan Spanyol yang telah berdagang di sana jauh lebih awal. Melalui hak oktroi ini, VOC memiliki kekuatan yang luas untuk memperkuat pengaruh Belanda atas Hindia Timur atau Nusantara sebagaimana disebut. Hak istimewa khusus VOC berlangsung selama 20 tahun dan dapat diperpanjang. (Trisna Wulandari, 2021)

Adapun dampak hak oktroi bagi Indonesia diantaranya adalah:

1. Terciptanya kekuasaan baru di Indonesia. Dilantiknya seluruh bagian dari Nusantara oleh VOC sebagai penguasa baru membuat sistem pemerintahan di seluruh pemerintahan VOC lebih lemah. Maka itu, sebagai pihak dominan, dalam hal ini adalah VOC dalam pemerintahannya dengan melahirkan berbagai wewenang; ditambah dengan hilangnya kekuasaan raja untuk waktu yang lama namun mengakibatkan dominasi oleh perusahaan-perusahaan seperti VOC.
2. Meningkatnya pemahaman tentang politik uang. Dengan hak oktroi Rakyat Indonesia semakin mengerti tentang politik uang serta cara membuat kontrak. Selain itu, mereka juga menjadi tahu soal berbagai jenis senjata modern, sistem keamanan dan lain-lain dari kalangan pribumi.
3. Perampasan hak rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia semakin kehilangan haknya berkat hak oktroi yang dipegang oleh VOC. Tentunya berbagai perbuatan perampokan yang dilakukan penguasa VOC menyebabkan penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Bahkan dalam banyak kesempatan VOC tidak ragu-ragu untuk menghilangkan penghapusan nadi untuk mendominasi Indonesia
4. Munculnya praktik penghamparan. Hak oktroi membuat tindakan penghisap oleh VOC terhadap rakyat Indonesia semakin luas dan berkembang. Pebudakan ini mengakibatkan datangnya kemiskinan serta menghancurkan rakyat Indonesia hingga tidak jarang ada yang sampai kehilangan nyawa Walaupun demikian tidak sedikit pada saat itu sejumlah kalangan justru mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika malahan bersedia dijadikan bahan penyelamat sementara bagi sebagian saja agar tetap hidup
5. Kerusakan hasil bumi milik rakyat Indonesia. Hak oktroi memberikan kesempatan kepada VOC membinasakan rempah-rempah milik rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem hak oktroi yang diwarisi dari pemerintahan kolonial Belanda mulai dihapuskan sebagai bagian dari reformasi struktural yang dimaksudkan untuk memulihkan kedaulatan ekonomi dan kemerdekaan politik negara yang baru didirikan. Hak oktroi dipandang sebagai simbol kolonialisme dan ketidakadilan karena memberikan kekuasaan khusus kepada perusahaan atau individu tertentu. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia yang baru dibentuk merasa perlu untuk menghapus sistem ini untuk secara langsung mengendalikan sumber daya dan ekonomi negara.

Penghapusan hak oktroi tersebut juga ditujukan untuk memperbaiki ketidakseimbangan kolonial antara struktur sosial dan ekonomi. Dengan menghapus hak istimewa yang sebelumnya menghasilkan manfaat besar hanya untuk beberapa orang; pemerintah Indonesia

mengupayakan sistem yang lebih adil dengan orientasi nasionalistis. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih inklusif sambil memberdayakan masyarakat lokal sehingga menghilangkan ketergantungan mereka pada ekonomi kolonial yang ada sebelumnya. (Fandy, 2021)

KESIMPULAN

Hak oktroi VOC adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada VOC untuk melakukan monopoli perdagangan di Hindia Timur (sekarang Indonesia). Dengan adanya hak oktroi, VOC berhasil menciptakan militer yang tangguh. Angkatan bersenjata ini dipergunakan untuk menekan kerajaan-kerajaan di wilayah Indonesia agar tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh VOC. Dalam hal ini, hak ini memberikan VOC kekuasaan monopoli atas teknologi atau komoditas tertentu. Pihak yang memegang hak oktroi boleh saja melarang pihak lain menggunakan penemuan tersebut untuk kepentingan komersial seperti produksi, pengimporan, penyimpanan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman. (2014). Indonesia dari Kolonialisme sampai Nasionalisme. Yogyakarta: Pujangga Press.
- Aprilia, M. (2024). Dunia Melayu di Bawah Kekuasaan Kolonial. *Jurnal Keislaman dan Peradaban*, 15-24.
- Basmatulhana, Hanindita, 2023, mengenal pieter both gubernur jendral voc pertama
- Fandy, 2021, Hak oktroi VOC dan pengaruhnya di Indonesia,
- Nurjamang, J. (2019). Jaringan Informasi dan Komunikasi Organisasi VOC di Sulawesi atau Makassar 1735-1737. *Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 69-99.
- Wulandari, Trisna, 2021, mengenal devide et impera politik voc untuk menghadapi perlawanan rakyat